

Arahan Pengembangan Desa-desa Potensial di Kecamatan Mepanga Menjadi Kawasan Perkotaan Baru Berdasarkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

*Tata Aisyah Rahmi¹, Muhammad Najib¹, Rezki Awalia¹, R Rizkhi¹

¹) Prodi PWK Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako

*Corresponding Author, Email: taisyahrahmi@gmail.com

Abstrak

Pembentukan kawasan perkotaan baru dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dinamika sosial-ekonomi yang mampu mendorong munculnya pusat pertumbuhan baru. Kecamatan Mepanga di Kabupaten Parigi Moutong memiliki sejumlah desa dengan potensi berkembang menuju kawasan perkotaan melalui peran program transmigrasi yang telah membentuk permukiman permanen dan layanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) melalui analisis deskriptif, skalogram, dan indeks sentralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di desa-desa tersebut masih perlu ditingkatkan agar memenuhi standar kawasan perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 25 Tahun 2016. Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas, Desa Kotaraya menempati Hierarki I sebagai pusat pelayanan utama, didukung Desa Kotaraya Selatan dan Kotaraya Barat (Hierarki II), serta Desa Kotaraya Timur dan Kotaraya Tenggara (Hierarki III). Arahan pengembangan yang diperlukan meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penguatan konektivitas antardesa, penataan regulasi kawasan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Dengan strategi tersebut, desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga dapat diarahkan menjadi kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata kunci: Desa potensial, kawasan perkotaan baru, ketersediaan sarana dan prasarana

Abstract

The transmigration program in Meganga District, Parigi Moutong Regency, began in 1973 with the establishment of the UPT in Unit I Mepanga, which has developed into five definitive villages, namely Kotaraya Village, South Kotaraya, West Kotaraya, East Kotaraya, and Southeast Kotaraya. These villages have the potential to be developed into New Urban Areas (KPB) in accordance with Government Regulation No. 3 of 2014. This research aims to formulate directions for the development of potential villages in Mepanga District into New Urban Areas based on the availability of facilities and infrastructure. The research method uses a mixed approach with descriptive analysis, scalogram, and centrality index. The results of this study show that these potential villages have the availability of facilities and infrastructure that still need improvement to meet the standards set in the Village Minister Regulation Number 25 of 2016. Based on the analysis of the scalogram and centrality index, Kotaraya Village as the main service center (Hierarchy I), supported by South and West Kotaraya Villages as supporting villages (Hierarchy II), and East and Southeast Kotaraya Villages as development villages (Hierarchy III). The direction of the development of potential villages in Mepanga District includes the improvement and development of basic infrastructure, inter-village connectivity, and regional planning regulations, as well as collaboration between the government, the community, and stakeholders needed to realize this area as a new integrated and sustainable growth center.

Keywords: Potential villages, new urban areas, availability of facilities and infrastructure

I. PENDAHULUAN

Pembentukan kota merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik fisik maupun nonfisik. Secara teoritis, pertumbuhan suatu kawasan menuju bentuk perkotaan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga oleh berkembangnya fungsi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dinamika sosial-ekonomi yang mendorong terjadinya konsentrasi aktivitas masyarakat. Dengan kata lain, kota lahir sebagai pusat pertumbuhan yang didukung oleh kapasitas ruang dan infrastruktur.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, program transmigrasi menjadi salah satu instrumen strategis yang berperan dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Program ini tidak hanya bertujuan untuk redistribusi penduduk, tetapi juga mengembangkan kawasan permukiman baru yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang (PP No. 3 Tahun 2014). Seiring perkembangannya, wilayah-wilayah transmigrasi diarahkan untuk menjadi simpul pertumbuhan yang berpotensi tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru.

Kecamatan Mepanga di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu wilayah yang sejak awal dekade 1970-an menjadi lokasi program transmigrasi. Kecamatan Mepanga di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan salah satu wilayah yang sejak awal dekade 1970-an menjadi lokasi program transmigrasi. Pembentukan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) I Mepanga pada tahun 1973–1974 telah berkembang menjadi lima desa definitif, yaitu Kotaraya, Kotaraya Selatan, Kotaraya Barat, Kotaraya Timur, dan Kotaraya Tenggara. Saat ini, kelima desa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kawasan permukiman, tetapi juga menunjukkan perkembangan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat.

Dengan potensi tersebut, desa-desa di Kecamatan Mepanga memiliki peluang untuk diarahkan menjadi kawasan perkotaan baru yang dapat memperkuat jaringan pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu, kajian mengenai ketersediaan sarana dan prasarana menjadi kunci dalam merumuskan arahan pengembangan desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga menjadi kawasan perkotaan baru.

Penelitian ini memperluas pendekatan ketiga studi tersebut dengan menggunakan metode campuran melalui analisis deskriptif, skalogram, dan indeks sentralitas untuk menilai kondisi sarana dan prasarana di lima desa transmigrasi di Kecamatan Mepanga. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kuantitatif atas kecukupan infrastruktur sekaligus identifikasi peran strategis desa dalam mendukung arah pengembangan kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan sarana dan prasarana sesuai Permendesa PDTT No. 25 Tahun 2016 diperlukan agar desa-desa tersebut dapat bertransformasi menjadi Kawasan Perkotaan Baru.

I.1 PENELITIAN TERDAHULU

Pratiwi (2022) meneliti kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan perbandingan terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM). Hasil penelitiannya mengidentifikasi kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta merumuskan konsep penataan permukiman berbasis karakteristik lokal. Mustabsir (2017) melakukan evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pembobotan skala likert. Penelitian ini memberikan arahan pengembangan kawasan berbasis penilaian indikator infrastruktur, yang relevan dalam konteks perencanaan kawasan agropolitan maupun kawasan tumbuh baru. Sementara itu, Lesmono (2022) mengombinasikan standar teknis dan persepsi masyarakat melalui pendekatan

kuantitatif dengan skoring likert untuk menilai ketersediaan sarana permukiman di Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu. Hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan antara kondisi aktual dan harapan masyarakat, yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi penataan permukiman.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk merumuskan arahan pengembangan desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga menjadi Kawasan Perkotaan Baru. Metode campuran ini mengintegrasikan antara data kualitatif dan kuantitatif secara simultan, guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan peran strategis masing-masing desa dalam struktur wilayah (Sugiyono, 2013).

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada lima desa Unit Transmigrasi I Mepanga, yaitu Desa Kotaraya, Kotaraya Selatan, Kotaraya Barat, Kotaraya Timur, dan Kotaraya Tenggara.

II.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data mengenai kondisi eksisting sarana dan prasarana permukiman, seperti infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, drainase, dan lainnya. Wawancara terstruktur yang dilakukan dengan perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan warga transmigran guna menggali informasi mengenai dinamika sosial, tantangan, serta kebutuhan pengembangan kawasan. Dokumentasi berupa arsip, peta, dan data sekunder dari instansi pemerintah juga dikumpulkan sebagai bahan pendukung dan validasi data lapangan.

II.2 Tahap Analisis

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai kondisi aktual ketersediaan sarana dan prasarana dengan mengacu pada standar dalam Permendesa PDTT No. 25 Tahun 2016. Pendekatan deskriptif kualitatif dipandang relevan karena memungkinkan peneliti mengevaluasi realitas lapangan secara mendalam dan kontekstual berdasarkan indikator yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Selain itu, analisis sarana dan prasarana desa menggunakan tolak ukur regulasi dan instrumen kebijakan dianggap penting untuk menilai kesesuaian dengan arah pengembangan kawasan perdesaan menuju perkotaan (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2017). Dengan demikian, penggunaan metode deskriptif kualitatif berbasis standar kebijakan mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual serta kesenjangan yang perlu ditangani dalam perencanaan pengembangan kawasan. Data kuantitatif dianalisis menggunakan metode Skalogram guna mengidentifikasi tingkatan pelayanan dan hierarki wilayah berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia di masing-masing desa, kemudian dilanjutkan menggunakan metode Indeks Sentralitas Marshal guna menentukan pusat pelayanan utama dan sekunder berdasarkan bobot fasilitas. Hasil kedua analisis ini menjadi dasar dalam klasifikasi desa sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) atau Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

II.3 Tahap Hasil

Data yang dikumpulkan diedit dan ditranskrip untuk menjamin kelengkapan dan akurasi. Data kualitatif dianalisis naratif, sedangkan data kuantitatif ditabulasi untuk perhitungan skor dan pembobotan fasilitas. Validasi dilakukan dengan mencocokkan data lapangan dan dokumen pendukung agar hasil yang disajikan mencerminkan kondisi aktual dan relevan dengan tujuan pengembangan kawasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Desa Potensial Dalam Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru

Kecamatan Mepanga merupakan wilayah pesisir hasil pemekaran dari Kecamatan Tomini yang resmi berdiri pada tahun 2006 dengan luas 207,10 km², terdiri dari 14 desa. Salah satu kawasan yang menunjukkan perkembangan pesat adalah eks-permukiman transmigrasi Unit 1 yang kini terbagi menjadi lima desa, yaitu Desa Kotaraya, Desa Kotaraya Selatan, Desa Kotaraya Barat, Desa Kotaraya Timur, dan Desa Kotaraya Tenggara.

Perkembangan kawasan ini bermula dari program transmigrasi tahun 1973–1974 yang menempatkan 500 KK (2.101 jiwa) di Unit 1 Mepanga. Setiap kepala keluarga menerima lahan 2 hektare yang terdiri dari pekarangan, perladangan, dan persawahan. Fasilitas umum yang disediakan cukup lengkap, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tempat ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 dibawah ini.

Tabel 1. Pemanfaatan Lahan Untuk Transmigrasi

| No | Pemanfaatan Lahan | Jumlah KK | Luas (Ha) | Jumlah Luas (Ha) |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1. | Pekarangan | 500 | 0,2 | 125 |
| 2. | Perladangan | 500 | 0,75 | 375 |
| 3. | Persawahan | 500 | 1 | 500 |
| Jumlah | | | | 1000 |

Sumber: Pemerintah Kecamatan Mepanga, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Unit I Transmigrasi Mepanga memiliki pola pemanfaatan lahan yang terencana dengan total luas 1.000 Ha, yang terbagi atas lahan pekarangan, perladangan, dan persawahan. Selain itu, wilayah ini juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum, meliputi kantor desa, balai desa, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, serta sarana olahraga, yang secara keseluruhan mencerminkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang cukup memadai. Rincian mengenai fasilitas umum yang terdapat di Unit I Mepanga dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 2. Fasilitas Umum Unit I Mepanga

| No | Fasilitas Umum | Jumlah |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1. | Kantor Unit Desa | 1 unit |
| 2. | Balai Desa | 1 unit |
| 3. | Mess Tamu | 1 unit |
| 4. | Poliklinik | 1 unit |
| 5. | Perumahan petugas transmigrasi | 1 unit |
| 6. | Gedung SD | 1 unit |
| 7. | Gedung SMP | 1 unit |
| 8. | Perumahan Dewan Guru | 1 unit |
| 9. | Gudang Logistik | 1 unit |
| 10. | Masjid | 1 unit |
| 11. | Gereja | 1 unit |
| 12. | Pura | 1 unit |
| 13. | Tanah pekuburan | 3 Ha |
| 14. | Lapangan Olahraga | 1 Ha |

Sumber: Pemerintah Kecamatan Mepanga, 2023

Penyerahan resmi masyarakat dan aset kepada pemerintah dilakukan pada tahun 1980, kemudian ditetapkan sebagai Desa Kotaraya melalui SK Bupati Donggala tahun 1981. Desa Kotaraya mengalami perkembangan pesat setelah menjadi desa definitif pada tahun 1980 yang ditandai dengan pemekaran wilayah secara berurutan: Kotaraya Timur (2008), Kotaraya Selatan

(2010), Kotaraya Barat (2011), dan Kotaraya Tenggara (2012). Pemekaran tersebut mencerminkan dinamika pertumbuhan wilayah yang tinggi. Pemekaran ini mencerminkan dinamika perkembangan wilayah yang signifikan, sehingga masing-masing desa dapat lebih fokus mengelola potensi dan sumber dayanya.

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data profil masing-masing desa, jumlah penduduk pada permukiman transmigrasi unit 1 ini adalah 8.816 jiwa. Desa Kotaraya Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak sekaligus kepadatan tertinggi, yaitu 2.580 jiwa dengan 1.709 jiwa/Km². Sebaliknya, Desa Kotaraya Tenggara memiliki jumlah penduduk terendah sebanyak 306 jiwa, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Desa Kotaraya Timur dengan 121 jiwa/Km². Untuk masing – masing jumlah penduduk yang ada di permukiman transmigrasi unit 1 ini dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Unit 1 Permukiman Transmigrasi

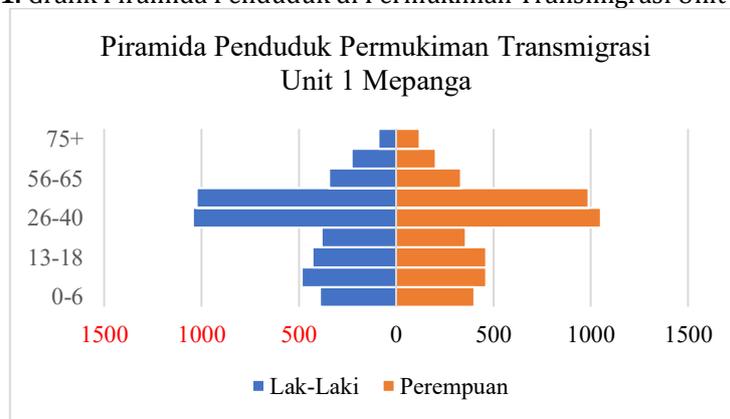
| Desa | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Kotaraya | 1,34 | 2.209 | 25,06 | 1649 |
| Kotaraya Selatan | 1,51 | 2.580 | 29,26 | 1709 |
| Kotaraya Barat | 2,73 | 2.242 | 25,43 | 821 |
| Kotaraya Timur | 12,20 | 1.479 | 16,78 | 121 |
| Kotaraya Tenggara | 2,00 | 306 | 3,47 | 153 |

Sumber: Pemerintah Kecamatan Mepanga, 2023

b. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Berdasarkan profil desa, jumlah penduduk laki-laki di permukiman transmigrasi Unit 1 Mepanga secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebagian besar penduduk pada permukiman ini berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit. Berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui bahwa penduduk mayoritas adalah kelompok usia 26-55 tahun (kelompok dewasa). Informasi selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1. Grafik Piramida Penduduk di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga



Sumber: Pemerintah Kecamatan Mepanga, 2023

III.2 Dukungan Ketersediaan Prasarana dan Sarana pada Masing–Masing Desa Potensial

Pembangunan prasarana merupakan komponen strategis dalam mendorong percepatan pengembangan kawasan perkotaan baru, khususnya di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Kecamatan Mepanga. Hasil identifikasi prasarana eksisting dengan mengacu pada standar yang tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 25 Tahun 2016 yang ada di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Identifikasi Prasarana Eksisting Pada Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Jenis Prasarana | Kotaraya | Kotaraya Selatan | Kotaraya Barat | Kotaraya Timur | Kotaraya Tenggara | Simpulan Kawasan |
|---|---|--|---|---|---|---|
| Jaringan Jalan dan Jembatan | Jaringan jalan di Desa Kotaraya telah berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, namun kondisinya belum optimal. Jalan kolektor dan jalan lingkungan sebagian sudah beraspal, tetapi masih terdapat ruas tanah, kerusakan, serta bahu jalan dan drainase yang belum memenuhi standar. | Jalan kolektor di Desa Kotaraya Selatan sepanjang 1,53 km (lebar 6–7 m) sebagian besar beraspal namun rusak di beberapa titik dengan fasilitas pendukung belum standar, sedangkan jalan lingkungan sepanjang 5,99 km (lebar 3–5 m) masih didominasi beton dan tanah. | Jalan kolektor sekunder di Desa Kotaraya Barat sepanjang 0,82 km dan jalan lingkungan sepanjang 9,04 km sebagian besar beraspal dan tanah, namun banyak mengalami kerusakan sehingga memerlukan pemeliharaan. | Jalan kolektor sekunder Desa Kotaraya Timur berupa Jalan I Gusti Ngurah Rai sepanjang 1,79 km dengan lebar 6–7 meter sebagian besar beraspal namun rusak di beberapa titik, sedangkan jalan lingkungan sepanjang 8,77 km dengan lebar 3–5 meter masih didominasi jalan tanah. | Jalan kolektor Desa Kotaraya Tenggara sepanjang 0,23 km dengan lebar 5–7 meter sudah beraspal namun memburuk, Rumija tidak terpenuhi, dan jalan lingkungan sepanjang 2,75 km masih didominasi jalan tanah | Kondisi jaringan jalan di kawasan secara umum sudah berfungsi sebagai penghubung antarwilayah dengan sebagian besar jalan kolektor beraspal, namun banyak mengalami kerusakan, sementara jalan lingkungan masih didominasi jalan tanah dan belum memenuhi standar sehingga memerlukan peningkatan kualitas. |
| Saluran Navigasi (Gorong-gorong dan Drainase) | Gorong-gorong beton berdiameter 60–80 cm masih tergolong kecil untuk menampung debit air hujan, dengan beberapa titik dalam tahap pembangunan | Gorong-gorong beton berdiameter 60–80 cm berfungsi sebagai saluran air beberapa mengalami sedimentasi dan penyumbatan. Drainase beton sepanjang 1.244,7 | Gorong-gorong beton berdiameter 60–80 cm berukuran 1,5 × 7 meter dan drainase sepanjang 1.322,9 meter yang sebagian besar berupa saluran terbuka | Drainase Desa Kotaraya Timur sepanjang 807,3 meter berupa saluran terbuka permanen, namun beberapa titik mengalami penyumbatan | Drainase Desa Kotaraya Tenggara sepanjang 383,8 meter terbagi menjadi aliran menuju drainase lokal di jalan poros desa dan aliran ke areal persawahan | Kondisi gorong-gorong dan drainase di Desa Kotaraya umumnya sudah berfungsi menyalurkan air, namun kapasitasnya masih terbatas, beberapa titik mengalami sedimentasi atau penyumbatan, serta |

| Jenis Prasarana | Kotaraya | Kotaraya Selatan | Kotaraya Barat | Kotaraya Timur | Kotaraya Tenggara | Simpulan Kawasan |
|----------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | meter sudah mencakup sebagian jalur utama | berfungsi menyalurkan aliran air, meski masih terdapat titik dengan saluran sederhana. | dengan aliran bermuara ke drainase lokal jalan poros desa dan areal persawahan | sebagai drainase sekunder. | sebagian saluran masih sederhana sehingga memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas |
| Prasarana Air Limbah | Pengolahan air limbah domestik dari rumah tangga masih belum memenuhi standar. | Sebagian besar air limbah bersumber dari aktivitas rumah tangga, tetapi pengolahannya belum sepenuhnya memenuhi standar. | Limbah domestik berasal dari dapur, WC, dan kegiatan rumah tangga lain, dengan sistem pengolahan yang masih belum memadai. | Air limbah rumah tangga didominasi oleh buangan dari dapur dan WC, namun pengolahan yang ada belum sesuai standar. | Sistem pengolahan air limbah masih belum standar meskipun sebagian besar limbahnya berasal dari aktivitas rumah tangga seperti dapur dan WC. | Pengelolaan air limbah domestik pada permukiman Transmigrasi Unit I Mepanga umumnya masih sederhana, dengan mayoritas limbah berasal dari aktivitas rumah tangga seperti dapur dan WC, namun sistem pengolahannya belum memenuhi standar sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. |
| Persampahan | Pengelolaan sampah dilakukan secara individu dengan fasilitas terbatas, sebagian dibakar di lahan kosong | Pengelolaan sampah masih mandiri dengan tempat sampah pribadi, namun ada yang membuang di lahan kosong. | Pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri dengan metode utama pembakaran terbuka di halaman rumah atau lahan kosong. | Pengelolaan sampah Desa Kotaraya Timur masih sederhana dan mandiri. Sebagian sampah rumah tangga dibakar serta terdapat lokasi penumpukan tanpa sistem terorganisir | Pengelolaan sampah Desa Kotaraya Tenggara masih tradisional dan individu, di mana sebagian besar masyarakat membakar sampah di halaman rumah atau lahan kosong. | Pengelolaan sampah di permukiman Transmigrasi Unit I Mepanga masih bersifat mandiri dan tradisional, dengan metode utama pembakaran di halaman rumah atau lahan kosong serta belum memiliki sistem pengelolaan yang terorganisir. |

Berdasarkan hasil observasi lapangan untuk ketersediaan sarana di masing-masing desa potensial di kawasan Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan fungsi fasilitasnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan desa utama yang berperan sebagai pusat pelayanan kawasan. Jenis fasilitas tersebut disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 5. Ketersediaan Sarana di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Fungsi Fasilitas | Nama Fasilitas | Jumlah | Kode |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Fasilitas Pelayanan Sosial | Paud/ TK | 8 | I |
| | SD/MI | 6 | J |
| | SMP/MTs | 2 | R |
| | Poskesdes | 2 | S |
| | Apotek | 6 | K |
| | Praktek Dokter Umum | 6 | L |
| | Posyandu | 11 | G |
| | Mushola/ Masjid | 26 | C |
| | Gereja | 3 | Q |
| | Pura | 19 | E |
| | Lapangan Olahraga | 1 | W |
| | Tempat Pemakaman Umum | 2 | T |
| | PLN | 1 | X |
| | Koperasi | 9 | H |
| | Kantor Polisi | 1 | Y |
| | Kantor Pos | 1 | Z |
| | Fasilitas Ekonomi | Toko/ Ruko | 203 |
| Pasar | | 1 | A1 |
| Minimarket | | 6 | M |
| Penginapan | | 13 | F |
| Bank | | 2 | U |
| Perbengkelan/ Otomotif | | 31 | B |
| Toko Pertanian | | 5 | N |
| Bumdes | | 5 | P |
| SPBU | | 1 | V |
| Gudang Pertanian | | 23 | D |
| Fasilitas Pemerintahan | Kantor Desa | 5 | O |
| Jumlah | | 399 | |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong, 2023

Tabel 6. Jumlah Fasilitas Permukiman Pada Masing-Masing Desa Di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Desa | Jumlah Penduduk (jiwa) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ZA1 | |
|-------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Kotaraya | 2.209 | 48 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kotaraya Selatan | 2.580 | 53 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kotaraya Barat | 2.242 | 61 | 14 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Kotaraya Timur | 1.479 | 26 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kotaraya Tenggara | 306 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 203 | 31 | 26 | 23 | 19 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |

Tabel 7. Analisis Skalogram Fungsi Permukiman Pada Masing-Masing Desa Di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Desa | Jumlah Penduduk (jiwa) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A1 | JF | KF (%) |
|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kotaraya Selatan | 2.580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 59 |
| Kotaraya Barat | 2.242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 67 |
| Kotaraya | 2.209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 81 | |
| Kotaraya Timur | 1.479 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 |
| Kotaraya Tenggara | 306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| TF | | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | |

Analisis Skalogram Guttman di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga menunjukkan tingkat kelengkapan 27 jenis fasilitas dengan total 75 fasilitas dan error 27, menghasilkan nilai *Coefficient of Reproducibility (COR)* sebesar 0,92, yang menunjukkan data layak dianalisis. Hasilnya, Desa Kotaraya dan Desa Kotaraya Barat berada di hierarki I sebagai pusat pelayanan, Desa Kotaraya Selatan di hierarki II, serta Desa Kotaraya Timur dan Desa Kotaraya Tenggara di hierarki III, dengan Desa Kotaraya Tenggara memiliki fasilitas paling sedikit karena statusnya sebagai desa pemekaran baru.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Indeks Skalogram

| Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | JF | Orde/ Hierarki |
|-------------------|------------------------|----|----------------|
| Kotaraya Selatan | 2.580 | 16 | II |
| Kotaraya Barat | 2.242 | 18 | I |
| Kotaraya | 2.209 | 22 | I |
| Kotaraya Timur | 1.479 | 12 | III |
| Kotaraya Tenggara | 306 | 7 | III |

III.3 Hierarki Desa - Desa Potensial Dalam Kawasan Perkotaan Baru

Analisis Indeks Sentralitas merupakan lanjutan dari analisis Skalogram yang digunakan untuk menentukan bobot setiap fasilitas berdasarkan jenis dan persebarannya di masing-masing desa. Metode ini membantu mengidentifikasi hierarki pusat-pusat pelayanan di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga berdasarkan jumlah, jenis fungsi, dan cakupan penduduk yang dilayani. Hasil analisis menunjukkan struktur pusat pertumbuhan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Baru, sekaligus mengungkap wilayah yang kurang terlayani.

Tabel 9. Perhitungan Bobot Fungsi/Fasilitas pada masing-masing Desa di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kotaraya Selatan | 2.580 | 48 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kotaraya Barat | 2.242 | 53 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kotaraya | 2.209 | 61 | 25 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kotaraya Timur | 1.479 | 26 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotaraya Tenggara | 306 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Fungsi | | 203 | 48 | 26 | 19 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Sentralitas | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bobot | | 0,49 | 2,08 | 3,85 | 5,26 | 7,69 | 9,09 | 11,11 | 12,5 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 20 | 20 | 25 | 33,33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 10. Perhitungan Nilai Index Sentralitas Terbobot pda masing-masing Desa di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A1 | Indeks Sentralitas |
|--------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Kotaraya Selatan | 2.580 | 23,6 | 25,8 | 34,6 | 8,7 | 0,0 | 15,4 | 27,3 | 11,1 | 12,5 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 16,7 | 40,0 | 20,0 | 25,0 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 544,1 |
| Kotaraya Barat | 2.242 | 26,1 | 16,2 | 38,5 | 13,1 | 0,0 | 23,1 | 18,2 | 33,3 | 25,0 | 16,7 | 0,0 | 50,0 | 33,3 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,4 |
| Kotaraya | 2.209 | 30,0 | 45,2 | 26,9 | 21,8 | 0,0 | 61,5 | 27,3 | 22,2 | 25,0 | 66,7 | 50,0 | 33,3 | 50,0 | 60,0 | 20,0 | 50,0 | 33,3 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 100 | 0,0 | 1123,3 |
| Kotaraya Timur | 1.479 | 12,8 | 6,5 | 0,0 | 34,8 | 78,9 | 0,0 | 18,2 | 33,3 | 25,0 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,2 |
| Kotaraya Tenggara | 306 | 7,4 | 6,5 | 0,0 | 21,8 | 21,1 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 |
| Total Sentralitas | | 100 | |

Penentuan orde kota didasarkan pada ketersediaan dan jumlah fasilitas perkotaan yang tersedia, meliputi pelayanan sosial, fasilitas ekonomi, fasilitas pemerintahan. Selain itu, juga dilihat berdasarkan dampak atau efek pelayanan dari fasilitas tersebut. Orde I adalah pusat kawasan di Permukiman Unit 1 Mepanga terdapat di Desa Kotaraya dimana memiliki dominan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas peribadatan serta perdagangan dan jasa yang mendukung perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis hierarki pusat permukiman yang dilakukan dengan menggunakan Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall, diperoleh orde-orde yang menentukan pusat permukiman menurut administrasi desa di Permukiman Unit 1 Mepanga. Berikut tabel yang akan menyajikan hierarki pusat kegiatan pada desa-desa di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga berdasarkan kelas intervalnya.

Tabel 11. Hirarki Pusat Kegiatan pada Desa-desa di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga

| Desa | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Indeks Sentralitas | Orde/ Hirarki |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Kotaraya Selatan | 2.580 | 544,1 | II |
| Kotaraya Barat | 2.242 | 588,4 | II |
| Kotaraya | 2.209 | 1123,3 | I |
| Kotaraya Timur | 1.479 | 346,2 | III |
| Kotaraya Tenggara | 306 | 98,2 | III |

Tabel 11. Hirarki Pusat Kegiatan pada Desa-desa di Permukiman Transmigrasi Unit 1 Mepanga menggambarkan konsentrasi tertinggi di Desa Kotaraya dan Kotaraya Barat. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall menegaskan Desa Kotaraya sebagai pusat pelayanan utama, didukung oleh peran strategis Desa Kotaraya Barat sebagai kawasan pendukung. Sinergi keduanya menciptakan pusat layanan utama yang optimal, memperkuat aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan serta pemerataan pembangunan kawasan melalui distribusi fasilitas yang saling melengkapi.



Gambar 2. Peta Hierarki Kawasan Perkotaan Baru

III.4 Arahan Pengembangan Desa – Desa Potensial di Kecamatan Mepanga Menjadi Kawasan Perkotaan Baru

Berdasarkan hasil analisis, wawancara, dan studi literatur mengenai pengembangan kawasan transmigrasi, diperoleh gambaran kebutuhan dan potensi masing-masing desa dalam mendukung terbentuknya kawasan perkotaan baru di Kecamatan Mepanga. Arahan pengembangan disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarki desa (Skalogram dan Indeks Sentralitas), kebutuhan pelayanan dasar, serta mengacu pada Permen Desa PDTT No. 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi. Arahan yang tepat untuk mendukung perkembangan desa-desa potensial menuju Kawasan Perkotaan Baru di Kecamatan Mepanga berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Fasilitas Penunjang Kawasan Perkotaan Baru

Dasar penetapan arahan pembangunan kawasan desa potensial perlu didasarkan pada analisis kesenjangan (gap) antara kondisi eksisting dengan standar kebutuhan yang berlaku. Saat ini, ketersediaan infrastruktur dasar di Kecamatan Mepanga masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Misalnya, jaringan jalan yang ada sebagian besar merupakan jalan lokal dengan kapasitas terbatas, sehingga aksesibilitas antar-desa dan konektivitas menuju pusat pelayanan wilayah belum optimal. Demikian pula, fasilitas jembatan dan sistem drainase belum sepenuhnya mampu mendukung mobilitas masyarakat maupun ketahanan lingkungan terhadap risiko banjir. Dari sisi pengelolaan lingkungan, sarana pengolahan air limbah dan pengelolaan sampah juga belum memadai, sehingga berpotensi menurunkan kualitas kesehatan dan lingkungan permukiman. Sementara itu, kebutuhan wilayah untuk mendukung transformasi desa menuju kawasan perkotaan baru menuntut tersedianya infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai standar kawasan transmigrasi maupun pedoman perencanaan perkotaan. Gap yang muncul antara ketersediaan saat ini dengan kebutuhan ideal menjadi dasar utama dalam merumuskan arah pembangunan ke depan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan kolektor, jembatan, drainase, serta sistem pengelolaan air limbah dan persampahan menjadi prioritas utama.

b. Penguatan Desa Pusat Pelayanan (Hierarki I)

Saat ini, ketersediaan infrastruktur di Desa Kotaraya masih terbatas, khususnya pada jaringan jalan kolektor sekunder, jalan lingkungan, jembatan penghubung antardesa, serta sistem drainase dan pengelolaan limbah. Jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal, kapasitas infrastruktur yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, penambahan fasilitas umum, serta penguatan sistem pengelolaan lingkungan menjadi prioritas utama untuk mendukung peran Desa Kotaraya sebagai pusat pelayanan kawasan perkotaan baru. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, diharapkan Desa Kotaraya mampu berfungsi secara optimal sebagai pusat pelayanan utama yang tidak hanya mendukung aktivitas masyarakat lokal, tetapi juga desa-desa sekitarnya dalam kerangka pengembangan wilayah.

c. Peningkatan Fasilitas Desa Pendukung (Hierarki II)

Desa Kotaraya Selatan dan Kotaraya Barat saat ini telah memiliki jaringan jalan lingkungan, fasilitas pendidikan dasar, serta layanan kesehatan tingkat dasar. Namun, dari hasil perhitungan kebutuhan sesuai standar pelayanan, masih terdapat kekurangan pada kualitas dan cakupan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan antar-desa, serta keterbatasan sarana pendidikan menengah. Kondisi drainase di beberapa wilayah desa juga belum berfungsi optimal, sehingga rawan banjir lokal saat musim hujan. Dari aspek pengelolaan lingkungan, desa-desa ini belum memiliki TPS maupun TPST yang memadai, sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan secara individual dan kurang terkontrol. Kesenjangan inilah yang mendasari kebutuhan

peningkatan jaringan jalan kolektor, normalisasi drainase, penyediaan sarana pendidikan menengah, pembangunan TPS/TPST, serta pengembangan sarana olahraga dan ruang terbuka hijau. Dukungan ekonomi diarahkan pada pembangunan industri kecil berbasis pengolahan hasil pertanian yang sesuai dengan potensi lokal.

d. Pengembangan Infrastruktur Dasar di Desa Pengembangan (Hierarki III)

Desa Kotaraya Timur dan Kotaraya Tenggara saat ini berfungsi sebagai desa pengembangan dengan fasilitas dasar yang relatif terbatas. Sarana jalan masih berupa jalan lingkungan dengan kualitas rendah, sementara kebutuhan ideal adalah adanya akses kolektor yang memadai untuk mendukung mobilitas barang dan orang. Fasilitas pendidikan hanya tersedia sampai tingkat dasar, sedangkan kebutuhan masyarakat telah mengarah pada layanan pendidikan menengah. Sistem drainase sebagian besar belum terbangun dengan baik sehingga rentan terjadi genangan. Dari aspek persampahan, desa-desa ini belum memiliki fasilitas pengelolaan terpadu (TPS/TPST), sehingga sampah banyak dibuang secara terbuka. Sementara itu, ruang terbuka hijau (RTH) dan sarana olahraga hampir tidak tersedia, padahal sangat dibutuhkan untuk kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya pengembangan infrastruktur dasar berupa perbaikan jalan, pembangunan drainase, penambahan fasilitas pendidikan menengah, penyediaan TPS/TPST, serta pembangunan RTH dan sarana olahraga. Selain itu, untuk mendukung perekonomian lokal, dibutuhkan pengembangan sentra industri kecil berbasis pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Desa

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas desa merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada tahap pemanfaatan fasilitas, tetapi juga harus diintegrasikan sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap fasilitas dan program pembangunan yang telah disediakan, sehingga keberlanjutannya dapat lebih terjamin. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan yang relevan dengan potensi desa, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pertanian, pengolahan hasil perkebunan, serta pengelolaan limbah rumah tangga maupun limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan pelatihan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan satuan permukiman transmigrasi di Kecamatan Mepanga, khususnya Desa Kotaraya, telah mengalami transformasi signifikan menjadi lima desa definitif, yaitu Desa Kotaraya, Desa Kotaraya Selatan, Desa Kotaraya Barat, Desa Kotaraya Timur, dan Desa Kotaraya Tenggara yang menjadikan kawasan ini sebagai wilayah potensial yang siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Mepanga.

Identifikasi desa potensial di Kecamatan Mepanga didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar Permendesa PDPT No. 25 Tahun 2016. Permukiman Transmigrasi Unit 1 telah berkembang menjadi lima desa definitif dengan kepadatan 890,6 jiwa/km². Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, pengelolaan limbah, dan fasilitas umum masih membutuhkan peningkatan untuk mendukung transformasi menjadi kawasan perkotaan baru. Sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, ruang terbuka hijau, dan industri pengolahan juga belum merata. Analisis skalogram dan indeks sentralitas menunjukkan Desa Kotaraya berada pada Hierarki I sebagai pusat pelayanan utama, didukung oleh Desa Kotaraya Selatan dan Kotaraya

Barat di Hierarki II, serta Kotaraya Timur dan Kotaraya Tenggara di Hierarki III yang masih memiliki keterbatasan namun berpotensi berkembang.

Arahan pengembangan desa-desa potensial di Kecamatan Mepanga menjadi Kawasan Perkotaan Baru dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar Permen Desa Nomor 25 Tahun 2016. Desa Kotaraya ditetapkan sebagai pusat pelayanan utama (Hierarki I), didukung Desa Kotaraya Selatan dan Kotaraya Barat (Hierarki II), serta penguatan infrastruktur dasar di Desa Kotaraya Timur dan Kotaraya Tenggara (Hierarki III). Prioritas pengembangan mencakup perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, persampahan, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan ruang terbuka hijau, pasar desa, SPBU, serta pendirian industri pengolahan hasil pertanian dan pengelolaan limbah menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, kajian selanjutnya disarankan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan sosial melalui pemanfaatan teknologi GIS dan analisis spasial. Evaluasi efektivitas standar sarana dan prasarana berdasarkan SNI dan SPM perlu dilakukan untuk menilai relevansinya terhadap kualitas hidup masyarakat. Penentuan lokasi prioritas pengembangan juga sebaiknya memperhatikan dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, serta posisi hierarki desa. Strategi pengembangan masa depan perlu berbasis potensi lokal dengan pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat, kerja sama antar lembaga, serta penguatan ekonomi desa melalui UMKM, industri kecil, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong. (2023). *Kecamatan Mepanga dalam Angka 2023. Kecamatan Mepanga Dalam Angka 2023*.
- Bakri, B., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Adibiwo, S. (2017). Analisis Indikator Sensitivitas dan Status Pembangunan Berkelanjutan Regional di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 265–280. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.265-280>
- Lesmono, P. B. (2021). *Ketersediaan Sarana Permukiman Berdasarkan Standar dan Persepsi Pemukim di Kelurahan Besusu Barat Kota Palu*. Repository UNTAD
- Mustabsir, R. (2017). *Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar*. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong 2010–2030*. Parigi Moutong: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- Pemerintah Kecamatan Mepanga. (2023). *Profil Desa-Desa di Kecamatan Mepanga Tahun 2023*. Parigi Moutong: Pemerintah Kecamatan Mepanga.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undnag Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi*.

Badan Standarisasi Nasional. (2004). *SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan*.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. ISBN: 979-8433-64-0.